



Sinergi Teritorial TNI–Polri dalam Pencegahan Radikalisasi Berbasis Komunitas: Studi Kasus Kota Solo

*Territorial Synergy between the Indonesian Military and Police in Community-Based
Counter-Radicalization: A Case Study of Solo City*

Dedy Indriyanto, Mhd Halkis, Erry Herman
Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI
Dedyindrips@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of radicalization and violent extremism in Indonesia has become increasingly dynamic, characterized by the emergence of small-scale networks, self-radicalized individuals, and the intensification of digital propaganda. Solo City represents a strategic locus in the history of radical movements in Indonesia and has simultaneously developed into a social laboratory for community-based counter-radicalization initiatives. This study aims to analyze the forms of territorial synergy between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) in preventing radicalization in Solo, identify implementation challenges at the grassroots level, and formulate a conceptual model to strengthen community security efforts. Employing a qualitative approach with a case-study design, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that the collaboration between Babinsa (territorial military officers) and Bhabinkamtibmas (community police officers) operates through social embeddedness, social-intelligence mapping, religious and community forums, religious-moderation education, and targeted support for vulnerable families and former terrorism convicts. Challenges arise from sectoral ego, limited digital-literacy capacity among territorial officers, and evolving patterns of online radicalization in closed digital spaces. This research proposes the **Territorial Co-Security Model**, emphasizing the co-production of security through the integration of state actors, religious leaders, community structures, and local government in building social resilience, promoting moderate religious identity, and strengthening early-warning mechanisms at the community level. The findings contribute to scholarly discussions on security governance, countering violent extremism, and territorial defense practices in the context of contemporary non-military threats. Policy recommendations include strengthening TNI–Polri collaboration protocols, enhancing digital-literacy training, establishing localized community-resilience centers, and reinforcing religious counter-narratives in both physical and digital public spheres.*

Keywords

Territorial synergy; Indonesian National Armed Forces (TNI); Indonesian National Police (Polri); community-based security; counter-radicalization; Countering Violent Extremism (CVE); territorial defense; Babinsa; Bhabinkamtibmas

Abstrak. Fenomena radikalisasi dan ekstremisme kekerasan di Indonesia menunjukkan pola yang semakin dinamis dengan keterlibatan jaringan kecil, individu mandiri, serta intensifikasi propaganda digital. Kota Solo menjadi salah satu wilayah strategis dalam sejarah pergerakan radikal di Indonesia sekaligus laboratorium sosial dalam upaya pencegahan radikalisasi berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk sinergi teritorial TNI–Polri dalam pencegahan radikalisasi di Solo, mengidentifikasi tantangan implementasi di tingkat lapangan, serta merumuskan model konseptual yang dapat memperkuat upaya keamanan komunitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas berjalan melalui pendekatan kehadiran sosial (*social embeddedness*), pemetaan intelijen sosial, forum keagamaan dan komunitas, edukasi moderasi beragama, serta pendampingan keluarga rentan dan eks-*napiter*. Tantangan ditemui dalam bentuk ego sektoral, keterbatasan kapasitas literasi digital aparat teritorial, dan evolusi pola radikalisasi berbasis ruang digital tertutup. Penelitian ini menawarkan konsep Territorial Co-Security Model, yang menekankan ko-produksi keamanan melalui integrasi aparatur negara, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan sosial, identitas keagamaan moderat, serta mekanisme deteksi dini berbasis komunitas. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian *security governance*, pencegahan ekstremisme, dan praktik pembinaan teritorial dalam konteks ancaman non-militer kontemporer. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan SOP kolaborasi TNI–Polri, pelatihan literasi digital, pembentukan pusat ketahanan sosial lokal, dan penguatan kontra-narasi keagamaan di ruang publik dan digital.

Kata Kunci, Sinergi TNI–Polri, Pembinaan Teritorial, Pencegahan Radikalisasi, Keamanan Berbasis Komunitas, Countering Violent Extremism (CVE)

1. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, lanskap ancaman terorisme global mengalami perubahan yang semakin kompleks, dinamis, dan sulit diprediksi. Jika pada awal tahun 2000-an pola terorisme cenderung terpusat pada jaringan organisasi besar seperti Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah, maka kini fenomena ekstremisme kekerasan berkembang menjadi lebih terfragmentasi dengan munculnya jaringan kecil, sel mandiri (*lone wolf*), dan mekanisme radikalisasi digital yang berlangsung tanpa kontak fisik langsung. Evolusi strategi kelompok teroris, baik dalam hal rekrutmen,

propaganda, maupun pelaksanaan aksi, menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis, psikologis, dan sosial. Mereka memanfaatkan ruang siber, algoritma media sosial, dan narasi identitas untuk menarik simpati dan memobilisasi aksi kekerasan. Kondisi ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yang memiliki sejarah panjang dalam menghadapi berbagai kelompok radikal dengan orientasi ideologis keagamaan dan politik.

Dalam konteks Indonesia, dinamika ancaman terorisme telah mengalami transformasi signifikan sejak aksi teror Bom Bali 2002 hingga serangkaian serangan terpisah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lokal yang terinspirasi oleh ideologi global seperti ISIS dan Al-Qaeda. Pola-pola radikalisme di Indonesia tidak hanya ditemukan dalam struktur terorganisir, tetapi juga dalam komunitas kecil, kelompok pengajian eksklusif, media sosial, dan lingkungan perkotaan tertentu. Salah satu wilayah yang memiliki catatan historis terkait radikalisme dan jaringan ekstremisme adalah Kota Solo, atau Surakarta, di Jawa Tengah. Solo dikenal sebagai salah satu ruang persemaian ideologi radikal pada periode awal 2000-an, di mana terdapat simpul-simpul jaringan radikal, pesantren tertentu yang menjadi tempat bertemunya tokoh-tokoh ekstremis, serta jejak aktivitas kelompok jihadis yang berafiliasi dengan Jemaah Islamiyah dan kemudian jaringan pro-ISIS. Seiring waktu, Solo juga menjadi arena penting bagi program deradikalisasi, pembinaan masyarakat, dan penguatan ketahanan sosial berbasis komunitas.

Perubahan karakter ancaman ini memberikan implikasi strategis bagi arsitektur keamanan nasional Indonesia. Pendekatan penanggulangan terorisme yang sebelumnya didominasi oleh strategi *hard power* berbasis penegakan hukum kini berkembang menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan preventif. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, TNI, dan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pendekatan *soft power* melalui pendidikan, pembinaan masyarakat, kontra-narasi, dan penguatan ketahanan

ideologi masyarakat. Transformasi ini mencerminkan paradigma baru keamanan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral dalam mencegah proses radikalisme sejak dini. Pendekatan tersebut dikenal sebagai *community-embedded security*, yaitu strategi keamanan yang menempatkan komunitas, jejaring sosial religius, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan setempat dalam satu ekosistem pencegahan.

Dalam konteks ini, sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi penting dan strategis. Kolaborasi Babinsa sebagai ujung tombak pertahanan teritorial dan Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi keamanan berbasis komunitas menjadi contoh konkret praktik pencegahan radikalisme yang berbasis kedekatan sosial dan komunikasi intensif dengan masyarakat. Kehadiran mereka di tingkat kelurahan dan desa merupakan bagian dari strategi *early warning* dan *early detection* terhadap potensi ancaman radikalisme. Pola kerja kolaboratif ini memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan masyarakat, mengidentifikasi gejala awal perubahan perilaku yang mengarah pada radikalisme, serta mengintegrasikan pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan dalam pencegahan ekstremisme. Oleh karena itu, sinergi TNI–Polri dalam konteks pencegahan radikalisme tidak sekadar persoalan koordinasi kelembagaan, tetapi bagian dari desain besar keamanan nasional berbasis pertahanan semesta dan kepolisian masyarakat.

Namun demikian, efektivitas sinergi ini perlu dikaji secara komprehensif, mengingat pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti ego sektoral, perbedaan doktrin, keterbatasan sumber daya, dan cepatnya perkembangan teknologi digital yang memerlukan adaptasi strategi. Dengan demikian, artikel ini mengajukan beberapa pertanyaan kunci, yaitu: pertama, bagaimana bentuk sinergi teritorial TNI–Polri dalam pencegahan radikalisme di Solo? Kedua, apa saja tantangan yang muncul dalam pelaksanaan sinergitas ini di tingkat lapangan? Ketiga, model

kolaborasi seperti apa yang paling efektif untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme berbasis komunitas di wilayah dengan risiko tinggi seperti Solo?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik sinergi TNI–Polri dalam konteks pencegahan radikalisme di Solo, mengidentifikasi hambatan dan peluang yang muncul dalam pelaksanaan strategi tersebut, serta merumuskan model penguatan upaya pencegahan radikalisme berbasis komunitas yang sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan historis Indonesia. Artikel ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *security governance*, *countering violent extremism*, dan pertahanan teritorial berbasis *whole-of-society approach*. Sementara secara praktis, artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi TNI, Polri, BNPT, dan pemerintah daerah dalam merumuskan dan memperkuat program pencegahan radikalisme berbasis komunitas secara lebih sistematis dan terukur.

Dengan menggabungkan pendekatan empiris lapangan, analisis kebijakan, dan perspektif teoretis dalam studi keamanan kontemporer, artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan radikalisme bukan hanya bergantung pada kemampuan represif negara, melainkan terletak pada kemampuan negara untuk membangun kepercayaan, partisipasi, dan ketahanan sosial masyarakat. Solo sebagai kawasan yang memiliki sejarah panjang terkait dinamika ekstremisme menjadi contoh penting bagaimana pola sinergi teritorial yang adaptif, inklusif, dan berbasis komunitas dapat menjadi model nasional dan bahkan rujukan dalam diskursus internasional mengenai pencegahan ekstremisme kekerasan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keamanan di era kontemporer adalah proyek bersama yang melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga ruang sosial dari infiltrasi ideologi ekstrem.

2. Kajian Literatur dan Kerangka Teori

Kajian mengenai radikalisme dan ekstremisme kekerasan berkembang dari studi tentang gerakan terorisme transnasional menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor psikologis, sosial, budaya, dan digital yang

memengaruhi proses radikalisisasi individu maupun kelompok. Radikalisisasi tidak lagi dipahami sebagai proses linier yang mengikuti struktur organisasi tertentu, tetapi sebagai transformasi bertahap yang dipicu oleh interaksi antara narasi ideologis, kondisi psikososial, pengalaman ketidakadilan, dan pengaruh jaringan sosial di dunia nyata maupun ruang digital. Literatur internasional menegaskan bahwa radikalisisasi merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan identitas (Neumann, 2013). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pencarian makna, rasa keterasingan sosial, dan persepsi terhadap ketidakadilan global menjadi faktor pendorong individu menuju ekstremisme, sementara teknologi digital mempercepat proses adopsi ideologi melalui propaganda visual, retorika agama, dan ruang percakapan tertutup.

Dalam konteks Indonesia, radikalisisasi memiliki karakteristik unik karena berkelindan dengan faktor historis, politik kolonial, dinamika konflik sektarian, dan jaringan ideologi transnasional. Sejumlah studi menyebutkan bahwa proses ideologisasi ekstrem memiliki akar kuat pada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap kekerasan sebagai sarana legitimasi penegakan syariat dan perubahan politik (Hoffman, 2017). Pengalaman konflik Poso, Ambon, dan aksi teror di Jawa memberikan gambaran bahwa radikalisisasi di Indonesia berkembang melalui jaringan informal, kelompok belajar agama eksklusif, dan pemanfaatan ruang dakwah yang tidak terawasi secara ketat. Sebagian cendekiawan menegaskan bahwa pendekatan pencegahan harus menyentuh dimensi sosial dan budaya, bukan hanya fokus pada operasi penindakan (Gunaratna & Iqbal, 2015). Oleh karena itu, literatur menempatkan keterlibatan komunitas, institusi pendidikan, dan tokoh agama sebagai aktor kunci dalam mereduksi risiko radikalisisasi sejak dini.

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah *community-based counter-terrorism*, yaitu model penanggulangan ekstremisme yang menempatkan masyarakat sebagai pusat mitigasi ancaman melalui deteksi dini, pemberdayaan sosial, dan pembentukan kesadaran kritis terhadap propaganda

kekerasan (Baggett & Janorschke, 2023). Dalam model ini, aparat keamanan tidak diposisikan sebagai satu-satunya subjek yang bertanggung jawab atas keamanan, melainkan sebagai fasilitator yang membangun koneksi dengan jaringan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *community policing*, di mana polisi terlibat secara langsung dalam dinamika sosial masyarakat untuk membangun kepercayaan dan koordinasi dalam menjaga keamanan lingkungan (Innes, 2014). Kombinasi antara pendekatan sosial dan keamanan menciptakan kondisi di mana ancaman dapat diidentifikasi melalui tanda-tanda awal perubahan perilaku, retorika intoleransi, atau pembentukan kelompok eksklusif yang berpotensi menjadi embrio radikalisme.

Dalam perspektif Indonesia, pendekatan berbasis komunitas tidak hanya berada dalam domain kepolisian, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan wilayah melalui doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). TNI melalui komponen Babinsa menjalankan fungsi pembinaan teritorial (Binter) yang bertujuan memelihara ketahanan wilayah, membina kemandirian TNI-rakyat, serta memastikan kesiapsiagaan ruang, alat, dan kondisi juang masyarakat. Sementara itu, Polri melalui Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari aspek penegakan hukum dan responsivitas terhadap dinamika sosial. Keduanya menjadi dua simpul penting dalam arsitektur keamanan lokal, terutama pada daerah rawan infiltrasi paham ekstremisme seperti Solo.

Pendekatan sinergi TNI-Polri dalam pencegahan radikalisme sejalan dengan konsep *co-production of security*, di mana aktor negara dan masyarakat berkolaborasi untuk menciptakan keamanan kolektif (Ostrom, 1996). Model ini menekankan bahwa pembinaan hubungan, penyampaian pesan moderasi, dan pendampingan sosial memiliki dampak signifikan dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme. Lebih jauh, literatur tentang *hybrid security governance* (Shearing & Wood, 2007; Dupont, 2006) menegaskan bahwa keamanan kontemporer tidak lagi hanya dihasilkan dari monopoli negara, melainkan terdistribusi di antara berbagai aktor termasuk tokoh agama, sekolah, keluarga, organisasi pemuda, dan komunitas digital.

Untuk memahami dinamika sinergi ini secara ilmiah, artikel ini menggunakan kerangka teori yang meliputi empat pendekatan utama. Pertama, **Teori Sistem** yang memandang keamanan sebagai interaksi elemen-elemen sosial, kultural, dan institusional yang saling berkaitan. Kedua, **Teori Securitization** (Buzan et al., 1998) yang menjelaskan bagaimana isu radikalisme dikonstruksi sebagai ancaman melalui proses diskursif dan kebijakan publik. Ketiga, **Collaborative Governance Theory** (Ansell & Gash) yang menjelaskan mekanisme kerjasama lintas lembaga negara dan masyarakat untuk mencapai tujuan keamanan bersama melalui konsensus dan jejaring sosial. Keempat, **Human Security Paradigm** yang menempatkan kesejahteraan, identitas, dan perlindungan sosial sebagai bagian integral dari keamanan nasional, sehingga pencegahan radikalisme harus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sosial, pendidikan keagamaan, dan ketahanan keluarga.

Dengan demikian, kajian literatur dan kerangka teori ini menegaskan bahwa pencegahan radikalisme efektif apabila dilakukan melalui kolaborasi terstruktur antara aparat negara dan elemen masyarakat. Pendekatan represif yang bersifat penindakan tetap penting sebagai upaya terakhir, tetapi strategi utama harus diarahkan pada penguatan komunitas dan ketahanan ideologi agar bibit radikalisme dapat ditangani sebelum berkembang menjadi ancaman keamanan nyata. Di titik inilah sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi model yang relevan untuk ditelaah, terutama dalam konteks Solo yang memiliki dinamika sosial-keagamaan dan sejarah gerakan radikal yang kompleks. Kerangka teori ini akan menjadi pijakan dalam menganalisis praktik lapangan, mengidentifikasi hambatan yang muncul, dan merumuskan model konseptual penguatan *community-embedded counter-radicalization* yang berkelanjutan dan kontekstual dengan realitas Indonesia.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika sinergi teritorial TNI-Polri dalam

pengecahan radikalisis berbasis komunitas di Kota Solo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berupaya menangkap fakta empirik terkait pola kerja, strategi, dan praktik kolaborasi aparat keamanan, tetapi juga ingin memahami makna, persepsi, dan interaksi sosial yang melatarbelakangi *community-embedded counter-radicalization*. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif efektif digunakan untuk mengeksplorasi proses sosial dan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka dan statistik, melainkan membutuhkan pemahaman interpretatif terhadap pengalaman dan perspektif pelaku.

Desain studi kasus dipilih karena Solo memiliki karakter unik sebagai daerah yang pernah menjadi episentrum penyebaran ideologi ekstremisme dan sekaligus wilayah yang menunjukkan inovasi dalam program kontra-radikalisis berbasis komunitas. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam dalam konteks nyata, sebagaimana dijelaskan Yin (2018), bahwa studi kasus memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hubungan antaraktor, konteks sosial, dan faktor lingkungan yang memengaruhi praktik lapangan. Dalam hal ini, penelitian tidak hanya memotret data formal dari institusi, tetapi juga mengamati pola interaksi sosial yang berlangsung antara Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, dan masyarakat.

Subjek penelitian melibatkan unsur-unsur kunci yang berperan langsung dalam pencegahan radikalisis, yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, pejabat BNPT wilayah, perangkat pemerintah daerah, tokoh agama, serta unsur masyarakat yang memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam program deradikalisis atau pembinaan komunitas. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yakni memilih subjek yang memiliki pemahaman mendalam serta pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan tambahan melalui rekomendasi informan sebelumnya,

terutama dalam menjangkau aktor sosial yang sensitif atau membutuhkan pendekatan kepercayaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai strategi kolaborasi, bentuk intervensi komunitas, persepsi mengenai tantangan dan peluang sinergi, serta pengalaman konkret aparat dalam mendeteksi dan menangani potensi radikalisasi. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan warga, patroli keagamaan, kegiatan penyuluhan, dan forum diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat. Sementara itu, telaah dokumen meliputi kajian terhadap regulasi resmi, laporan kegiatan keamanan wilayah, panduan internal TNI dan Polri terkait pembinaan teritorial dan pembinaan masyarakat, serta publikasi BNPT terkait program kontra-radikalisasi.

Data dianalisis menggunakan pendekatan *thematic coding*, yakni mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari data naratif berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan. Proses analisis melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Analisis dilakukan secara iteratif, artinya proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara bersamaan untuk memastikan kedalaman interpretasi dan relevansi temuan. Triangulasi data digunakan sebagai mekanisme validitas penelitian, yaitu mencocokkan data dari berbagai sumber, teknik, dan perspektif untuk memastikan keakuratan temuan dan menghindari bias interpretasi. Triangulasi dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara dengan observasi lapangan, serta pencocokan informasi dengan dokumen resmi dan laporan kebijakan.

Pertimbangan etika menjadi aspek penting dalam penelitian ini mengingat topik yang sensitif dan melibatkan isu keamanan negara. Oleh karena itu, identitas informan dirahasiakan, informasi sensitif mengenai operasi keamanan tidak didokumentasikan secara detail, dan proses wawancara dilakukan dengan

mengutamakan prinsip kerahasiaan, privasi, dan persetujuan sadar (*informed consent*). Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak menimbulkan risiko bagi informan atau mengganggu strategi keamanan nasional.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sinergi TNI–Polri dalam pencegahan radikalisasi di Solo, baik dari aspek operasional, sosial, maupun kultural. Pendekatan kualitatif studi kasus memungkinkan peneliti menangkap realitas lapangan secara mendalam dan menghadirkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan kritis untuk pengembangan model kebijakan pencegahan radikalisasi berbasis komunitas di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan utama penelitian terkait implementasi sinergi TNI–Polri dalam pencegahan radikalisasi berbasis komunitas di Kota Solo, serta membahas temuan tersebut dalam kerangka teori *collaborative security*, *territorial defense*, dan *community-engagement policing*. Pembahasan dilakukan melalui penelusuran dinamika sosial, struktur kolaborasi, pola deteksi dini, peran tokoh agama dan masyarakat, serta tantangan operasional yang muncul di lapangan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan radikalisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan represif institusi keamanan negara, tetapi justru terletak pada kemampuan membangun keakraban kultural, kepercayaan publik, dan struktur sosial yang inklusif dalam memutus rantai ekstremisme dari akar sosialnya.

4.1 Gambaran Wilayah Solo dan Jejak Radikalisme

Kota Solo dikenal sebagai salah satu wilayah strategis dalam dinamika radikalisme di Indonesia. Pada awal 2000-an, kota ini menjadi episentrum aktivitas beberapa jaringan ekstremis, termasuk individu-individu yang kemudian diketahui terlibat dalam aksi teror besar seperti Bom Bali. Selain itu, beberapa pesantren dan

kelompok dakwah tertentu pada masa lalu menjadi ruang persemaian ideologi ekstrem. Namun, dalam satu dekade terakhir, Solo juga menjadi laboratorium sosial bagi upaya kontra-radikalisasi berbasis komunitas. Pemerintah kota, tokoh agama, aparat keamanan, dan unsur masyarakat sipil berhasil menciptakan kultur sosial keagamaan yang lebih terbuka dan moderat. Hal ini mencerminkan proses *resocialization* masyarakat terhadap nilai kebangsaan, toleransi, dan religiositas yang damai.

Dari perspektif geostrategis, Solo memiliki keunikan karena merupakan wilayah yang heterogen secara sosial, memiliki basis ekonomi mikro yang kuat, serta memiliki jejaring pesantren, organisasi keagamaan, dan komunitas pemuda yang aktif. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi upaya pencegahan radikalisasi. Peluang muncul dari modal sosial keagamaan yang relatif kondusif, sementara tantangan muncul dari kemungkinan infiltrasi paham radikal melalui ruang-ruang dakwah informal dan pergaulan digital anak muda.

4.2 Pola Sinergi TNI–Polri dalam Pencegahan Radikalisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Solo tidak hanya bersifat administratif, tetapi berwujud dalam interaksi sosial yang nyata dan berkelanjutan. Terdapat lima pola sinergi utama yang teridentifikasi:

a. Kehadiran Sosial (Social Embeddedness)

Babinsa dan Bhabinkamtibmas hadir aktif dalam kegiatan komunitas, mulai dari pengajian, kegiatan karang taruna, pos ronda, hingga pendampingan keluarga rentan. Pendekatan ini mencerminkan konsep *security as presence*, di mana keamanan dibangun melalui kedekatan sosial dan penyampaian pesan secara interpersonal. Kehadiran fisik ini menciptakan rasa kedekatan serta konsolidasi emosional antara aparat dan masyarakat, khususnya dalam lingkungan urban yang rentan pada dinamika pergeseran identitas dan pemikiran keagamaan.

Seorang informan Bhabinkamtibmas menyampaikan, “*Kita hadir bukan hanya untuk patroli, tetapi untuk menjadi bagian dari keseharian warga. Dari situlah kita bisa tahu perubahan sikap yang mencurigakan.*” Pandangan ini menegaskan pentingnya pendekatan *proximity security* dalam mencegah radikalisasi.

b. Deteksi Dini dan Pemetaan Sosial (Social Intelligence Mapping)

Aparat melakukan pemetaan sosial terhadap kelompok berisiko, ruang dakwah baru, lingkaran pertemanan pemuda, dan keluarga yang pernah terpapar jaringan ekstrem. Proses ini berjalan melalui pengamatan keseharian, percakapan informal, dan komunikasi dengan tokoh masyarakat. Tidak ada pendekatan represif yang dominan, melainkan dialog intensif untuk memastikan bahwa potensi radikalisasi dapat dikenali sejak dini. Babinsa dan Bhabinkamtibmas kerap melakukan *home visit* untuk memastikan kondisi sosial keluarga tertentu, terutama yang memiliki anak laki-laki usia produktif atau keluarga yang terdeteksi mengonsumsi konten radikal secara daring.

c. Forum Kolaborasi Keamanan Sosial

Praktik sinergi diwujudkan melalui forum lintas tokoh agama, FKUB, aparat kecamatan, dan kelompok pemuda. Di forum ini, aparat dan tokoh agama mendiskusikan isu-isu keagamaan aktual dan merespons penyebaran ajaran takfiri, intoleransi, atau gerakan dakwah eksklusif. Forum ini bersifat fleksibel; terkadang berlangsung formal, tetapi sering juga terjadi secara nonformal di rumah tokoh masyarakat atau ruang publik.

d. Pendidikan Keamanan dan Moderasi

Babinsa dan Bhabinkamtibmas memberi penyuluhan kepada generasi muda tentang bahaya radikalisme dan strategi membangun ketahanan ideologis. Kegiatan ini dilakukan melalui sekolah, pesantren, majelis taklim, dan platform digital

komunitas. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya *preventive education* yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga menysar ruang informal anak muda.

e. Pendampingan Keluarga Rentan dan Mantan Napiter

Temuan lapangan menunjukkan bahwa salah satu kekuatan terbesar pendekatan Solo adalah pendampingan sosial bagi keluarga mantan narapidana terorisme dan pemuda yang pernah terindikasi terpapar radikalisme. Strategi ini menekan potensi resosialisasi ekstremisme dan membantu reintegrasi sosial.

4.3 Peran Tokoh Agama dan Pesantren Moderat

Komunitas ulama, kyai pesantren, dan pimpinan majelis taklim moderat memegang peran sentral dalam ekosistem pencegahan radikalisasi. Mereka berfungsi sebagai *normative gatekeeper* yang memvalidasi diskursus keagamaan dan membimbing umat agar tidak terjebak dalam tafsir keagamaan eksklusif dan intoleran. Kolaborasi aparat dengan tokoh agama menegaskan tesis bahwa *soft power religious* merupakan modal sosial paling efektif dalam meredam ideologi kekerasan.

Solo memiliki tradisi keagamaan Jawa yang inklusif, menekankan akhlak, dialog, dan kesantunan dalam beragama. Tradisi ini menjadi benteng kultural yang menahan penetrasi ideologi takfiri. Aparat memanfaatkan jejaring ulama moderat untuk mengamplifikasi narasi kebangsaan, Pancasila, dan Islam rahmatan lil 'alamin.

4.4 Tantangan Sinergitas di Lapangan

Walaupun sinergi berjalan efektif, terdapat beberapa tantangan penting:

1. **Ego Sektoral dan Beda Budaya Organisasi.** TNI berbasis komando hirarkis militer, sementara Polri memiliki budaya kerja berbasis penegakan hukum. Kadang terjadi perbedaan persepsi dalam mengelola informasi dan tindakan lapangan.

2. **Keterbatasan Literasi Digital Aparat Teritorial.** Upaya mendeteksi radikalisme digital belum optimal karena tidak semua aparat terlatih dalam investigasi media sosial, OSINT, dan analisis digital.
3. **Keterbatasan Sumber Daya.** Jumlah Babinsa dan Bhabinkamtibmas terbatas dibanding jumlah masyarakat dan luas wilayah pemantauan sosial.
4. **Adaptasi Ancaman Ekstremisme.** Kelompok radikal semakin canggih dalam infiltrasi melalui ruang dakwah daring dan pergaulan privat. Propaganda digital bersifat *encrypted*, *personalized*, dan cepat menyebar.

4.5 Peluang dan Faktor Penguat

Meski terdapat tantangan, penelitian menemukan beberapa faktor pendukung penting:

- Tradisi sosial Jawa yang komunikatif dan solutif
- Jejaring ulama moderat yang luas
- Kekuatan komunitas pemuda dan organisasi Islam besar
- Dukungan pemerintah kota dalam program keamanan humanis
- Model komunikasi personal aparat yang berorientasi pelayanan

Sinergi ini juga diperkuat oleh legitimasi moral aparat yang dipandang bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai *abdi masyarakat* yang hadir membangun ketenteraman sosial.

4.6 Rasionalitas Model Sinergi Solo

Berdasarkan temuan, sinergi Solo menunjukkan ciri:

Elemen	Penjelasan
---------------	-------------------

Paradigma	Preventif & human security
-----------	----------------------------

Instrumen	Relasi sosial, dakwah moderat, patroli sosial
-----------	---

Pendekatan	<i>Soft policing + territorial defense</i>
------------	--

Prioritas	Deteksi dini dan pembinaan
-----------	----------------------------

Elemen Penjelasan

Karakter Humanis, persuasif, embedded

Model ini menggeser paradigma dari keamanan koersif menuju *keamanan sosial kolaboratif*, mendukung tesis bahwa *security is locally produced*.

5. Model Konseptual: Territorial Co-Security Model

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan pencegahan radikalisme di Solo tidak hanya bergantung pada intervensi struktural negara, tetapi lebih pada kemampuan aktor keamanan untuk melebur secara kultural dalam ruang sosial masyarakat. Model konseptual yang dirumuskan dari hasil penelitian ini disebut Territorial Co-Security Model, yaitu pendekatan keamanan kolaboratif berbasis kedekatan sosial yang mengintegrasikan kekuatan kerja teritorial TNI, fungsi pembinaan Polri, jaringan tokoh agama, unsur pemerintahan lokal, dan dukungan keluarga serta komunitas dalam satu ekosistem pencegahan radikalisme yang menyeluruh.

Model ini berangkat dari tiga premis utama. Pertama, ancaman radikalisme bersifat sosial-kultural dan non-linear sehingga membutuhkan pendekatan keamanan humanis, adaptif, dan berbasis kepercayaan. Kedua, keamanan di tingkat lokal lebih efektif diproduksi melalui kedekatan sosial dibandingkan operasi represif semata. Ketiga, pertahanan negara dalam konteks ancaman non-militer mensyaratkan integrasi pertahanan-keamanan berbasis rakyat, sebagaimana tertuang dalam doktrin Sishankamrata dan prinsip *community-engagement policing*.

Dalam model ini, Babinsa dan Bhabinkamtibmas berperan sebagai frontline social sentinels, yakni penjaga keamanan sosial yang mengawasi dinamika ideologi dan kohesi sosial secara langsung melalui partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Mereka tidak bertindak sebagai aktor koersif semata, melainkan sebagai pendidik sosial, mediator konflik, fasilitator dialog keagamaan, dan pelindung sosial

komunitas rentan radikalisasi. Kegiatan seperti *home visits*, penguatan pemuda melalui karang taruna, pendampingan keluarga eks-napiter, serta penguatan literasi digital menjadi bentuk implementasi dari peran ini.

Selain itu, tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam menjadi *moral shield* yang menjaga otentisitas ajaran agama dan memastikan narasi keagamaan berjalan dalam koridor moderasi, kebangsaan, dan toleransi. Dalam kerangka ini, ulama dan kyai memegang fungsi *ideological filtering*, yaitu memilah dan meluruskan paham keagamaan yang menyimpang sebelum menjadi embrio radikalisasi. Pemerintah daerah berperan sebagai penguat kebijakan publik dan penyedia dukungan program sosial, sedangkan masyarakat dan keluarga memiliki fungsi *grassroots surveillance* – pemantauan perilaku sosial di lingkungan masing-masing secara informal.

Dari sisi operasional, model ini mengintegrasikan lima pilar strategi:

- a. **Presence-based prevention** – kehadiran aparat di ruang sosial warga.
- b. **Community intelligence** – pemetaan sosial dan deteksi dini.
- c. **Religious-value reinforcement** – kerja sama dengan ulama moderat.
- d. **Family engagement & social rehabilitation** – fokus pada kelompok rentan.
- e. **Digital literacy & narrative resilience** – penguatan terhadap propaganda daring.

Keseluruhan pilar ini berlandaskan nilai kolaboratif: kepercayaan, keterbukaan komunikasi, koordinasi lintas lembaga, dan orientasi kemanusiaan dalam menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, **Territorial Co-Security Model** menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan radikalisasi di Solo merupakan hasil dari integrasi kekuatan sosial, kearifan lokal, dan ketahanan ideologi masyarakat.

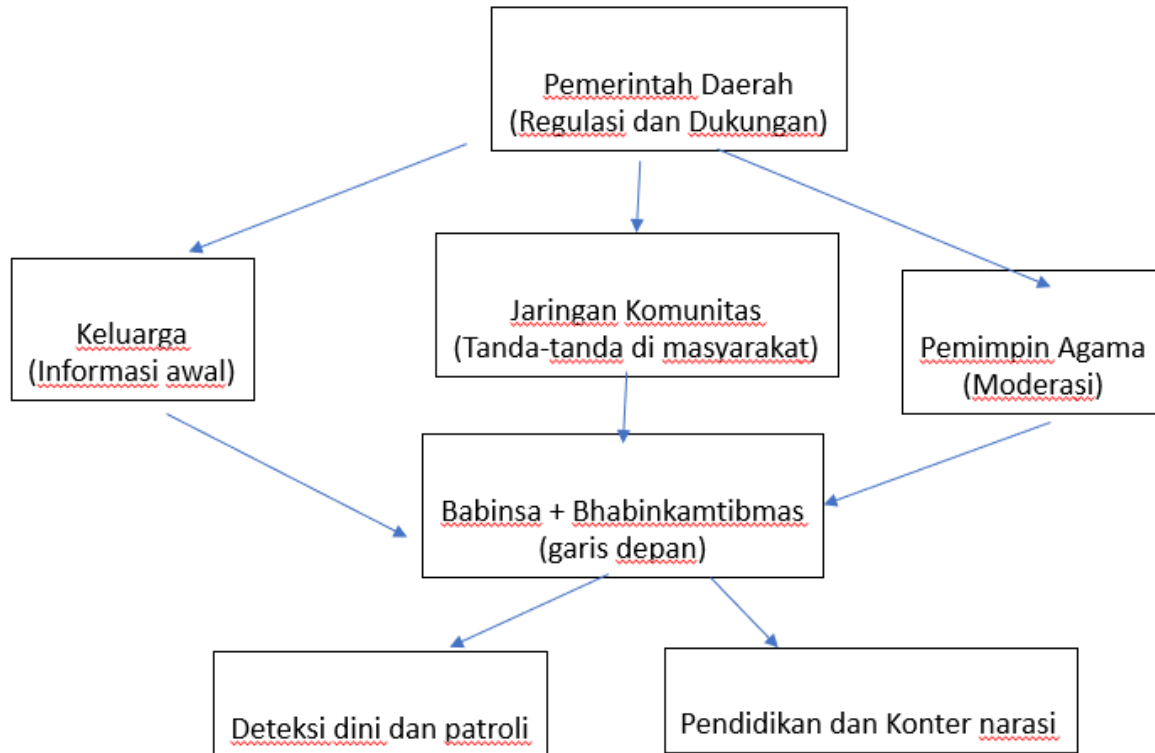


Diagram Model Konseptual: Model Keamanan Teritorial Bersama

Posisi Model dalam Diskursus Akademik

Model ini memberikan kontribusi konseptual pada kajian *security governance* dengan menekankan bahwa keamanan lokal bukan sekadar fungsi institusi negara, melainkan hasil ko-produksi antara warga, ulama, dan aparat teritorial. Selain itu, model ini memperkaya literatur *counter-extremism* global dengan menawarkan pendekatan khas Indonesia yang menempatkan kearifan lokal, religiusitas moderat, dan jaringan sosial sebagai fondasi utama ketahanan ideologi masyarakat.

Dalam konteks kebijakan nasional, model ini sejalan dengan strategi BNPT mengenai *Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi* serta memperkuat doktrin TNI tentang pembinaan teritorial dan peran Polri dalam pembinaan keamanan masyarakat. Oleh

karena itu, model ini dapat direplikasi di wilayah Indonesia lain yang memiliki karakter sosial serupa dan menghadapi tantangan radikalisme berbasis komunitas.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan radikalisasi di Kota Solo merupakan proses yang kompleks, multidimensional, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, kultural, dan keagamaan masyarakat. Sinergi antara TNI dan Polri melalui peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas terbukti menjadi elemen kunci dalam menjaga ketahanan sosial dan mencegah berkembangnya ideologi ekstremisme kekerasan di tingkat akar rumput. Pendekatan yang dilakukan bukan hanya bersifat struktural dan operasional, tetapi juga mengandalkan relasi interpersonal, dialog keagamaan, dan pembinaan sosial yang berkelanjutan. Kehadiran aparat di tengah masyarakat, interaksi personal dengan warga, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan membangun tingkat kepercayaan tinggi yang menjadi fondasi utama keberhasilan pencegahan radikalisasi secara dini.

Kesuksesan pendekatan ini menunjukkan bahwa model keamanan nasional dalam menghadapi ancaman non-militer – khususnya ekstremisme berbasis ideologi – tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme represif. Alih-alih, keamanan yang berkelanjutan muncul dari kemampuan negara untuk membangun **ko-produksi keamanan** antara aparat dan masyarakat. Dalam konteks Solo, sinergi teritorial menawarkan *hybrid security model* yang menyeimbangkan unsur pertahanan kewilayahan, kepolisian komunitas, dan pemberdayaan sosial-religius. Hal ini selaras dengan prinsip *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta* (Sishankamrata) dan pendekatan *human security*, di mana masyarakat ditempatkan sebagai aktor kunci dalam menciptakan keamanan melalui penguatan kesadaran, keterlibatan, dan kepercayaan. Model konseptual **Territorial Co-Security Model** yang dirumuskan dalam penelitian ini memberikan kontribusi teoretis penting dalam kajian *security governance* dan pencegahan ekstremisme. Model ini menekankan bahwa keamanan komunitas hanya dapat dicapai jika terdapat kolaborasi terstruktur antara TNI, Polri, tokoh agama,

pemerintah daerah, komunitas pendidikan, organisasi pemuda, dan keluarga. Pendekatan ini memprioritaskan *early warning*, pembinaan keluarga rentan, pendidikan moderasi beragama, serta penguatan pemuda dan komunitas digital sebagai ruang baru konflik ideologis. Temuan ini memberikan arah penting bagi penyusunan kebijakan keamanan nasional yang lebih responsif terhadap kompleksitas ancaman kontemporer.

Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti ego sektoral, perbedaan doktrin organisasi, keterbatasan kemampuan literasi digital aparat teritorial, serta dinamika radikalisisasi digital yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berbasis kebijakan untuk mengoptimalkan kolaborasi TNI–Polri ke depan.

Rekomendasi

a. Institusionalisasi Doktrin Sinergi TNI–Polri

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan SOP bersama mengenai kolaborasi pencegahan radikalisisasi berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi implementasi.

b. Penguatan Kapasitas Aparat dalam Literasi Digital dan OSINT

Pelatihan intensif perlu diberikan kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi radikalisisasi digital, analisis media sosial, dan strategi kontra-narasi daring.

c. Pembangunan Pusat Ketahanan Sosial Lokal

Pemerintah daerah perlu membentuk *community resilience center* yang melibatkan ulama moderat, psikolog, akademisi, pemuda, dan aparat untuk memfasilitasi program edukasi dan konseling.

d. Ekspansi Program Pendampingan Keluarga Rentan dan Eks-Napiter

Dukungan sistematis terhadap keluarga dan individu yang pernah terpapar ekstremisme perlu diperkuat melalui pembinaan sosial, ekonomi, dan spiritual.

e. **Kolaborasi Pendidikan Moderasi Beragama**

f. Perluasan program literasi keagamaan moderat di pesantren, sekolah, dan platform digital menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat.

g. **Penelitian Lanjutan Berbasis Komparatif**

Studi lanjutan perlu dilakukan untuk membandingkan model Solo dengan wilayah lain, seperti Poso, Lamongan, atau Bekasi, untuk memperkaya kerangka konseptual dan menemukan pola nasional yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan radikalisme paling efektif bersandar pada kekuatan sosial-komunitarian, kearifan lokal, serta jaringan keagamaan yang moderat. Sinergi teritorial TNI–Polri bukan hanya strategi keamanan, tetapi paradigma pembangunan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai benteng pertama dan terakhir pertahanan ideologi kebangsaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baggett, H. C., & Janorschke, D. (2023). Community policing in counter-terrorism: A systematic review. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*.
<https://doi.org/10.1080/18335330.2022.2134636>

- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Conway, M. (2021). Determining the role of the internet in violent extremism. *Terrorism and Political Violence*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/09546553.2021.1880191>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dupont, B. (2006). Power struggles in the network society: Crime, policing and citizenship in the era of control. *Policing & Society*, 16(2), 93–111. <https://doi.org/10.1080/10439460600662098>
- Gunaratna, R., & Iqbal, K. (2015). *Handbook of terrorism in the Asia-Pacific*. Imperial College Press. <https://doi.org/10.1142/9789814632427>
- Hoffman, B. (2017). *Inside terrorism* (3rd ed.). Columbia University Press.
- Innes, M. (2014). *Signal crimes: Social reactions to crime, disorder, and control*. Oxford University Press.
- Kemenhan RI. (2022). *Doktrin pertahanan negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Neumann, P. R. (2013). The trouble with radicalization. *International Affairs*, 89(4), 873–893. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12049>
- Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development*, 24(6), 1073–1087. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00023-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023-X)
- Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, de-radicalisation & counter-radicalisation. *ICCT Research Paper*.
- Shearing, C., & Wood, J. (2007). *Imagining security*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203962205>



Williams, P. D. (2018). *Security studies: An introduction* (3rd ed.). Routledge.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.